

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan Kepulauan di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang memiliki potensi Pariwisata terutama wisata kepulauan dan bahari. Hal ini dikarenakan Kepulauan Riau memiliki wilayah perairan seluas 96%, dan hanya 4% wilayah daratan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki aktivitas lintas batas yang cukup tinggi, khususnya dalam bidang pariwisata. Kepulauan Riau memiliki kawasan destinasi pariwisata yang sangat beragam, yakni: wisata alam, wisata bahari, wisata religi, wisata belanja, wisata agro, wisata MICE, wisata kuliner, wisata olahraga, dan wisata sejarah. Destinasi wisata di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tujuan favorit wisatawan mancanegara, khususnya Singapura saat berkunjung ke Kepulauan Riau (kepriprov, n.d.).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keunggulan dari segi letak geografis karena berada di kawasan perbatasan internasional dan berdekatan langsung dengan negara seperti Singapura. Posisi tersebut membuat aktivitas lintas batas di wilayah Kepulauan Riau berlangsung cukup intens, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan pariwisata. Kondisi ini mendorong Pemerintah daerah untuk mulai menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Dalam perspektif hubungan internasional, keterlibatan pemerintah daerah

dalam aktivitas seperti ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam membangun hubungan luar negeri untuk mendukung pembangunan daerah (Mukti, 2013)

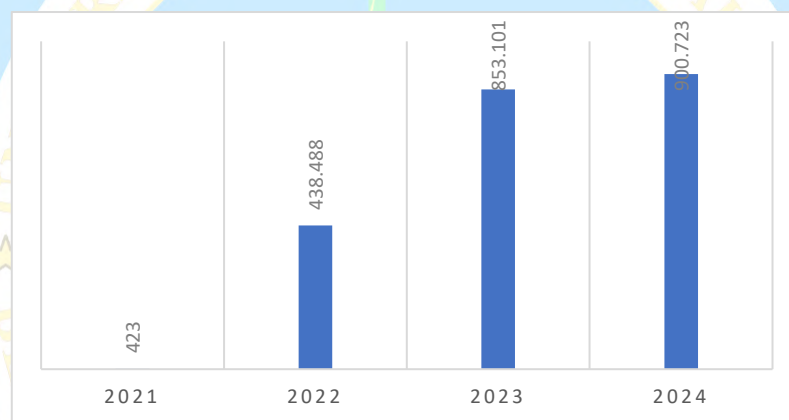
Di Indonesia, ruang bagi pemerintah daerah untuk berinteraksi dengan aktor luar negeri terbuka seiring dengan penerapan otonomi daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur hubungan dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan melakukan kerja sama internasional selama tetap berada dalam koridor kebijakan nasional dan kepentingan negara.

Keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai aktor subnasional dalam menjalin hubungan lintas batas dengan Singapura ini didasarkan pada kepentingan daerah, khususnya di sektor pariwisata. Keterlibatan internasional pemerintah daerah muncul ketika daerah menangani kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui kebijakan pemerintah pusat, sehingga mendorong daerah untuk menjalin kerja sama lintas batas secara langsung pada isu-isu yang tergolong *low politic*, seperti pariwisata.

Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura, menjadikan wilayah ini aktif dalam kerja sama lintas batas. Khususnya di Batam dan Bintan, wilayah ini memiliki peran penting sebagai pintu masuk utama wisatawan asal Singapura. Kedekatan geografis antara Batam, Bintan, dan Singapura memungkinkan mobilitas wisatawan yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat melalui jalur laut. Yang dimana jarak tempuh Batam-Singapura sekitar 45-60 menit dan Bintan-Singapura sekitar 60 menit (Amalia et

al., 2023). Kondisi ini pada dasarnya membentuk sebuah hubungan ketergantungan antara Kepulauan Riau dan Singapura di sektor pariwisata. Namun, karena perbedaan skala ekonomi dan tingkat ketergantungan Kepulauan Riau terhadap wisatawan Singapura yang lebih dominan, hubungan ini cenderung bersifat asimetris. Hal ini menempatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam posisi kerentanan, di man kunjungan wisatawan dari Singapura akan berdampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian daerah.

Gambar 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Kepulauan Riau



Sumber: Data olahan peneliti, 2026 (ppid.Kepulauan Riauprov.go.id)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan data dari tahun 2022-2024 pasca covid-19 terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura, jika pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura hanya sebanyak 423 kunjungan yang disebabkan oleh penutupan perbatasan akibat COVID-19. Namun, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura ke Kepulauan Riau memang meningkat pasca pandemi yaitu sebanyak 438.488 wisatawan, pada tahun 2023 jumlah kunjungan

wisatawan asal Singapura sebanyak 853.101 kunjungan, dan jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura tahun 2024 sebanyak 900.723 kunjungan.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Bintan yang selama ini bergantung pada wisatawan asal Singapura. Penutupan perbatasan internasional dan kebijakan pembatasan perjalanan menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan Singapura mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2020–2021. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor perhotelan, transportasi lintas negara, dan perekonomian masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas pariwisata (Rizkiyanti & Zahidi, 2024). Peristiwa ini secara jelas menunjukkan tingginya tingkat kerentanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat hubungan interdependensi asimetris tersebut.

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia yang dikhususkan di Kepulauan Riau resmi mengoperasikan Travel Bubble antara kawasan Batam, Bintan dan Singapura sebagai upaya pemulihan kembali sektor pariwisata yang sempat ditutup karena pandemi (Sembiring, 2023). Kebijakan ini pada dasarnya dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai pengusul dan pelaksana di daerah. Kebijakan Travel Bubble merupakan sistem perjalanan terbatas dan terkontrol yang dirancang untuk membuka pariwisata secara aman. Kebijakan ini memungkinkan pergerakan wisatawan mancanegara, khususnya Singapura dengan penerapan protokol kesehatan dan tanpa karantina (kepriprov.go.id, 2022).

Pada tahun 2023, upaya pemulihan dan Pemasaran wisata diperkuat melalui strategi Pemasaran wisata dan penyelenggaraan berbagai event internasional. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata menyusun kalender event pariwisata yang menyasar wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik daerah dan memperkuat citra Kepulauan Riau sebagai destinasi lintas batas (Putri, 2023). Dikutip dari laman PosmetroBatam.co, 2026 beberapa event unggulan dalam kalender pariwisata Kepulauan Riau yang digelar di tahun 2023. Diantaranya, event Bajafast yang digelar 28-29 Juli 2023, Tour de Batam yang digelar 22-24 September 2023. Lalu, ada Golf Carnival RB25 yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Oktober 2023, selanjutnya Tour de Bintan tanggal 14-16 Oktober 2023, Bintan Triathlon pada 21-22 Oktober 2023, dan Bintan Culture Fest pada 25-26 November 2023. Ini merupakan bentuk upaya Promosi pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kunjungan wisata dari kondisi pasca pandemi Covid-19.

Kemudian kebijakan *Visa On Arrival* khusus bagi Kepulauan Riau yang diusulkan langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui audisensi dengan Jenderal Imigrasi, Sily karim pada 1 maret 2023 (Ogen, 2023). Pengusulan tersebut dilakukan dengan permohonan pengurangan biaya VoA dan penyesuaian masa tinggal wisatawan asing di Kepulauan Riau. Usulan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan daerah dan keinginan meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan asal Singapura pasca pandemi Covid-19 (Mulya, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga mulai terlibat aktif dalam aktivitas hubungan lintas batas dengan Singapura melalui sektor pariwisata. Keterlibatan tersebut terlihat melalui pelaksanaan Travel Bubble Batam-Bintan-Singapura, Promosi pariwisata, penyelenggaraan event internasional, serta dukungan terhadap kebijakan bebas visa terbatas bagi wisatawan Singapura. Upaya tersebut menunjukkan adanya strategi aktif yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca Covid-19.

Meskipun kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap terlihat dalam proses implementasinya, terutama melalui dukungan Dinas Pariwisata yang aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut serta mendorong pemanfaatannya oleh pelaku industri pariwisata daerah (terasbatam, 2024). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mendukung kebijakan tersebut dengan memperkuat sektor pendukung pariwisata, seperti peningkatan layanan di pelabuhan internasional, pengembangan destinasi wisata di Batam dan Bintan, serta kolaborasi dengan pelaku usaha seperti hotel, agen perjalanan, dan operator transportasi laut. Dengan demikian, kebijakan bebas visa ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan mengoptimalkan sektor pariwisata, yang diwujudkan melalui fasilitasi kerja sama lintas batas antara Kepulauan Riau dan Singapura.

Globalisasi dan otonomi daerah telah mendorong meluasnya aktor Hubungan Internasional, tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor subnasional yang menjalin kerja sama lintas batas. Dalam upaya kerja sama lintas batasnya, pada tahun 2021 pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah mempersiapkan Nota Kesepahaman (MOU) tentang kepariwisataan, yang akan disampaikan kepada pemerintah Singapura. Pembahasan ini merujuk pada MOU yang sudah pernah ditandatangani sebelumnya pada tahun 2016 (*Indonesia Persiapkan MoU Dengan Singapura Terkait Pariwisata* , 2021).

Meskipun jumlah kunjungan wisatawan Singapura ke Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada periode 2022–2024, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana posisi kerentanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hubungan interdependensi asimetris dengan Singapura di sektor pariwisata. Selain itu, belum banyak dibahas bagaimana upaya Pemasaran wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi kerentanan tersebut dan meningkatkan kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19. Penelitian mengenai strategi Pemasaran wisata daerah dalam konteks pemulihan pariwisata pasca pandemi di wilayah perbatasan dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap negara tetangga masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana upaya Pemasaran wisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap

Singapura dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada periode 2022–2024 pasca Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hubungan internasional, khususnya terkait peran pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dalam mengatasi kerentanan ketergantungan pariwisata melalui strategi promosi dan pemulihan sektor pariwisata di kawasan perbatasan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana posisi kerentanan (vulnerability) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hubungan interdependensi asimetris dengan Singapura di sektor pariwisata pasca Covid-19?
2. Bagaimana upaya Peromosi pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Singapura sebagai strategi untuk mengatasi kerentanan dan meningkatkan kunjungan wisatawan pada tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis posisi kerentanan (vulnerability) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hubungan interdependensi asimetris dengan Singapura di sektor pariwisata pasca Covid-19.
2. Menganalisis upaya Pemasaran wisata (Travel Bubble, Visa On Arrival, dan Pemasaran Pariwisata digital/event) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Singapura sebagai strategi mengatasi kerentanan dan meningkatkan kunjungan wisatawan tahun 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait Pemasaran wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional di sektor pariwisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai upaya Pemasaran wisata dalam meningkatkan kunjungan wisata tahun 2022-2024 pasca pandemi Covid-19. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang posisi kerentanan (vulnerability) Kepulauan Riau dalam hubungan interdependensi asimetris dengan Singapura, Pemerintah dapat menyusun strategi promosi dan diversifikasi pasar wisata yang lebih efektif, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pariwisata lintas batas, serta meminimalisir kerentanan ekonomi daerah jika terjadi krisis serupa di masa yang akan datang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional untuk mengembangkan pemahaman mengenai upaya Pemasaran wisata sebagai strategi mengatasi kerentanan dalam hubungan interdependensi asimetris, khususnya di kawasan perbatasan internasional seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Singapura pasca Covid-19.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan teori Interdependensi Kompleks serta konsep

pemulihan pariwisata secara empiris, khususnya dalam menganalisis dinamika pemulihan ekonomi di wilayah perbatasan pasca pandemi.

